# **DAFTAR PUSTAKA**

Ardini, Maya Larasati. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi*. Universitas Negeri Sebelas Maret.

Baeti, Nur. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.* Universitas Negeri Semarang.

Brigham, Eugene F. dan Joul F Houston. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Business Research Methods*, New York: McGraw-Hil

Erlina, Rambe S. et al (2017), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual,* Edisi ke-3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Fauziah (2018), *SAP Standar Akuntansi Pemerintah,* Edisi Ke-1, Jakarta: Penerbit ilmu

Firdaus, Dahlia, Djoko Sigit Sayogo, dan Sri Wahjuni Latifah. (2015). *Evaluasi Penerapan PP No 71/201 Tentang SAP Berbasis Akrual : Studi Kasus di Pemda Nganjuk*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 16 No.1, Januari 2015, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Ghozali, Imam. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ke-9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hilmi, A. Z dan Dwi Martani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV.

Jensen, M.C. and W.H. Meckling. (1976). *“Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure.”* Journal of Financial Economics 3, 305-360.

Kusumawardani, Media. (2012). *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Jurnal Akuntansi,* Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.

Lesmana, Sigit Indra. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia* . Universitas Negeri Sebelas Maret.

Liqoana, M. Adim. (2016). *Pengaruh karakteristik daerah terhadap pengungkapan sukarela dalam website pemda di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Universitas Negeri Sebelas Maret.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniansih. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*: Journal and Proceeding FEB UNSOED

Martani, D., dan Liestiani, A. (2012). *Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. Global Review of Accounting and Finance*. Vol.3. No.1 March,67-84.

Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Rebenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan:* Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. Diambil dari http//www.sna.akuntansi.unikal.ac.id

Naopal, Fikrinah, Sri Rahayu, dan Siska Priyandani Yudowati. (2017). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* Universitas Telkom Bandung

Nugroho, Adi. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Putra, Rediyanto. et al (2018), *Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia.* Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018, Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.

Rahim, Wanda Mustika dan Dwi Martani. (2015). *Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah.* Skripsi. Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2001. *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Singel Window.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Puspita, Rora dan Dwi Martani. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*: Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 2012.

Sandhani, N. Ana. (2014*). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Informasi secara Sukarela dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Sebelas Maret.

Sofia, Alfira dan Bagus Husen. (2013). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website:* Jurnal Manajemen Indonesia

Sari, Adelia Pramita, Dwi Martani, dan Dyah Setyaningrum. (2015). *Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*: Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Setiawan, Mohammad Bhakti dan Abdul Hakim. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,* Universitas Islam Indonesia.

Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. (2012*). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*

Setyowati, Lilis. (2016). *Determinan Yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: Jurnal Bisnis dan Manajemen

Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: Jurnal Akuntansi & Auditing

Supriyadi, Suwanda D. et al (2017), *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah,* Edisi Ke-1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wulandari, Niken Ayu dan Sulardi. (2018). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela:* Akuntansi Dewanta.